



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Ankara, Turki dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor : 90/PIMP/III/2010-2011, dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara, peningkatan kerjasama *Parliament to Parliament*, dan kerjasama di bidang industri pertahanan serta mengadakan Rapat Kerja dengan Duta Besar RI di Ankara dalam rangka melakukan pengawasan sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI untuk Turki di Ankara dalam mendukung program-program Pemerintah dengan Pemerintah Turki juga melakukan pelayanan untuk perlindungan WNI di Turki.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan adalah :

1. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program Pemerintah.
2. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dengan negara-negara sahabat melalui pendekatan *Parliament to Parliament*.
3. Di bidang pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan. Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Turki adalah untuk menciptakan diversifikasi kerjasama militer RI dengan negara-negara mitra, sekaligus untuk melihat dan memperoleh gambaran dari dekat tentang bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan industri-industri strategis untuk pertahanan dapat dilaksanakan di negara-negara tersebut, untuk menjadi masukan bagi industri strategis/pertahanan nasional, serta mendorong kerja sama antara industri strategis/pertahanan nasional.

4. Di bidang Intelijen. Komisi I DPR RI saat ini sedang melakukan pembahasan terhadap RUU Intelijen Negara yang kedepan akan menjadi payung hukum bagi kegiatan intelijen di Indonesia. UU ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan intelijen Negara untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap UU yang berakibat pada pengurangan hak-hak sipil dan warga Negara. Untuk itu Komisi I DPR RI memandang perlunya informasi terkait dengan kegiatan intelijen di ke-4 (empat) negara tersebut.

C. SUSUNAN DELEGASI

Adapun susunan Delegasi Komisi I DPR RI ke Turki terlampir.
(*lampiran 1*)

D. ACARA KUNJUNGAN

(*lampiran 2*)

BAB II

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI KE TURKI

17 – 22 APRIL 2011

1. Kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki, H.E. Mr. Abdullah Gül, Istana Cankaya, tanggal 19 April 2011

- a) Pada pertemuan ini Presiden Gül masih sangat terkenang dengan kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 4-6 April 2011 lalu dan memberikan apresiasi atas sambutan dari Pemri dan pengaturan program yang sangat baik selama kunjungannya di Indonesia.

Mengingat pentingnya peran Parlemen Indonesia dalam memajukan hubungan bilateral, begitu mendengar adanya kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke Turki, Presiden Gül langsung meminta staf Kantor Kepresidenan untuk pengaturan pertemuan Presiden Gul dengan Delegasi RI.

Selanjutnya Presiden mengharapkan agar kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam rangka memajukan kerjasama industri pertahanan kedua negara.

- b) Ketua Delegasi Komisi I dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa bagi Indonesia :
- Merupakan suatu kehormatan yang besar bagi delegasi Komisi I DPR-RI untuk dapat diterima oleh Presiden Turki, yang belum lama ini baru saja melakukan kunjungan kenegaraan balasan ke Indonesia.
 - Kunjungan Presiden Gül merupakan kunjungan balasan yang tercepat dan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun (dan hal tersebut menunjukkan arti penting hubungan dan kerjasama kedua negara yang memiliki nilai historis, khususnya sejak abad ke-16 melalui kontak antara kesultanan Osman dengan kesultanan Aceh dan kesultanan Buton (Sulawesi).
 - Indonesia dan Turki dinilai memiliki peran sentral dan dapat menjadi *role model* dalam transformasi demokrasi serta perdamaian di kawasan masing-masing.
 - Memberikan apresiasi kepada industri pertahanan Turki yang dinilainya telah memberikan inspirasi bagi revitalisasi industri pertahanan Indonesia. Masih terdapat potensi besar yang dapat dilakukan untuk membangun dan mempererat suatu kerjasama industri pertahanan kedua negara. Untuk itu, sekembalinya dari Turki, Komisi I DPR-RI akan segera menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati oleh kedua pemimpin negara pada saat kunjungan, termasuk kerjasama industri pertahanan.
 - Mengharapkan sebelum masa jabatan Presiden Gül berakhir, dapat kembali berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Aceh, yang belum terealisasi pada saat kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini .

2. Pertemuan dengan H.E. Yasar Yakis, Ketua Komisi Harmonisasi Uni Eropa, Parlemen Turki, tanggal 18 April 2010

- a) Pada pertemuan tersebut, H.E. Yasar Yakis (Mantan Menlu) mengekspresikan rasa merasa gembira dapat turut serta dalam rombongan kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada tanggal 4-6 April 2011 lalu dan berharap kerjasama kedua negara dapat ditingkatkan lagi.

Beliau mencatat adanya faktor sejarah yang mengikat kedua negara sejak abad ke-16.

Lebih lanjut adanya kesepakatan/perjanjian kedua negara yang perlu segera ditindaklanjuti, termasuk kerjasama industri pertahanan kedua negara yang telah ditindaklanjuti dengan saling kunjung antar pejabat tinggi kedua negara.

Dan Turki siap untuk bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan terkait alutsista Indonesia, termasuk berbagai teknologi. Menurut catatannya, terdapat sejumlah perusahaan Turki yang sudah menjalin hubungan dengan mitranya di Indonesia yakni perusahaan FNSS dengan PT Pindad, untuk pengadaan kendaraan tempur.

- b) Ketua Delegasi Komisi I dalam pertemuan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan menerima Delegasi Komisi I DPR-RI di Masa Reses Parlemen dan persiapan pemilu legislatif pada bulan Juni 2011.

Ketua Delegasi mengharapkan agar pelaksanaan Pemilu Parlemen di Turki dapat berjalan lancar dan menjadi inspirasi dan model bagi negara-negara di Afrika Utara/Timur Tengah yang saat ini tengah beraspresiasi untuk menjadi negara demokratis.

Selanjutnya, Ketua Delegasi menjelaskan bahwa kerjasama industri pertahanan diantara kedua negara sangat penting untuk dilakukan, mengingat saat ini terdapat 10 industri pertahanan Indonesia yang sejak krisis ekonomi 1998 masih berusaha untuk bangkit kembali. Dalam kaitan ini, DPR-RI tengah menyusun suatu RUU industri pertahanan yang diharapkan dapat mendorong bangkitnya industri pertahanan Indonesia.

Dalam merevitalisasi industri pertahanan Indonesia diperlukan investasi, transfer teknologi dan jaminan keberlangsungan industri pertahanan; untuk itu diharapkan Turki dapat memberikan dukungan/kerjasama yang dibutuhkan.

3. Pertemuan dengan Undersecretary Kemhan Turki, Letjen Umit Dunder, tanggal 18 April 2010

- a) Pada pertemuan ini Letjen Dunder menyampaikan beberapa hal, yakni :
- Mencatat titik penting peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Industri Pertahanan pada saat kunjungan Presiden RI ke Turki (Juni 2010) dan saling kunjung pejabat militer kedua negara, a.l kunjungan Kepala Staf TNI-AD (2011).

- Segera menginstruksikan perusahaan industri pertahanan Turki untuk segera melakukan kunjungan ke Indonesia dalam waktu dekat (perusahaan Roketsan, Aselsan, T.A.I, FNSS). Sebaliknya, diharapkan delegasi teknis industri pertahanan Indonesia dapat segera melakukan kunjungan ke Turki untuk membahas berbagai aspek kerjasama termasuk transfer teknologi dimana Turki siap memberikan dukungannya.
 - Turki memiliki kesepakatan dengan AS dan UE dalam kerjasama produksi persenjataan dan untuk pengiriman produk ke negara ketiga yang melibatkan kesepakatan dengan AS dan UE tersebut, terdapat ketentuan dan prosedur tertentu guna menjamin keamanannya.
 - Mencatat telah ditandatanganinya Protokol Kerjasama Industri Pertahanan yang perlu segera ditindaklanjuti.
- b) Delegasi Komisi I dalam pertemuan ini menjelaskan Kunjungan Komisi I DPR-RI dalam rangka mengumpulkan informasi yang diperlukan sehingga pada saat proses ratifikasi naskah Perjanjian Kerjasama Industri Pertahanan yang ditandatangani oleh kedua Presiden pada bulan Juni 2010 akan berjalan dengan lancar tanpa memerlukan perdebatan panjang.
- Lebih lanjut, dijelaskan kembali ketiga prinsip bahwa dalam kerjasama membangun industri pertahanan diperlukan investasi yang saling menguntungkan untuk membangun kembali 10 perusahaan industri pertahanan, kesepakatan yang jelas untuk transfer teknologi dan jaminan keberlangsungan industri pertahanan.

4. Pertemuan dengan Perusahaan Industri Strategis Turki, tanggal 18-19 April 2010.

- a) Dalam kunjungan ke berbagai industri pertahanan Turki di Ankara, Komisi I DPR-RI telah memperoleh gambaran yang jelas menyangkut kapabilitas, kemampuan produksi, penggunaan teknologi, sarana-prasarana, prosedur pembelian, dan kesesuaian peralatan yang dibuat untuk kondisi Indonesia. Selain itu diperoleh informasi mengenai kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (umumnya dimiliki oleh Kemhan Turki).

Merujuk pada perjanjian yang ditandatangani di bidang industri pertahanan oleh RI-Turki pada bulan Juni 2010 (termasuk penandatanganan Protokol Kerjasama Industri Pertahanan yang ditandatangani pada bulan April lalu), terdapat keinginan kuat dari industri tersebut untuk melakukan dan membangun kerjasama erat termasuk kemungkinan produksi dan pengembangan bersama yang permanen dalam upaya revitalisasi industri pertahanan RI.

Terdapat perusahaan industri pertahanan yang sudah memiliki perjanjian dengan Industri pertahanan Indonesia melalui kesepakatan MoU, yakni FNSS dengan PT Pindad untuk kendaraan tempur yang ditandatangani pada April 2010.

Keinginan kerjasama dari seluruh industri pertahanan Turki, khususnya untuk pengembangan roket (Roketsan), produksi kendaraan tempur, modernisasi pesawat yang dimiliki TNI AU (antara T.A.I dengan TNI-AU: F-16, B-737, C-130)

Selama kunjungan tersebut juga diperagakan sejumlah peralatan tempur jenis tank. Oleh perusahaan FNSS

5. Pertemuan dengan Undersecretary Badan Intelijen Turki, Dr. Hakan Fidan, tanggal 18 April 2010.

- a) Dalam rangka penyusunan RUU Intelijen di Indonesia, pertemuan tersebut Ketua Delegasi mendiskusikan mengenai polemik RUU Intelijen yakni antara kebutuhan keamanan dan penghormatan HAM.

Selanjutnya, saling melakukan tukar informasi terkait dengan masalah *interception* (phone tapping), penahanan sementara, koordinasi setiap fungsi lembaga intelijen, dan isu pengawasan eksternal atas lembaga intelijen.

- b) Kepala BIN Turki menjelaskan mengenai pelaksanaan UU Intelijen Turki, yakni :
- Sesuai UU Intelijen Turki yang baru, untuk kegiatan *phone tapping* diperlukan keputusan pengadilan Turki yang berlaku selama 90 hari.
 - Terkait masalah koordinasi, *by law* seluruh kantor/aparatur negara Turki diwajibkan untuk memberikan informasi apabila diminta oleh Badan Intelijen Turki. Kepala Badan Intelijen Turki juga menjabat sebagai koordinator intelijen Turki. Kegiatan Badan hanya terpusat pada koleksi data dan analisis tanpa memiliki wewenang untuk menangkap sama sekali.
 - Kepala Badan Intelijen bertanggung jawab kepada Perdana Menteri Turki saja dan tidak terdapat lembaga *Parliamentary Intelligence Oversight Committee* di Parlemen Turki yang secara khusus menangani hal tersebut.

6. Pertemuan dengan Duta Besar RI di Ankara beserta jajarannya, tanggal 17 April 2010.

- a) Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Delegasi Komisi I DPR-RI dengan Dubes RI beserta jajarannya yang diisi dengan paparan oleh Dubes RI Ankara mengenai *overview* perkembangan hubungan bilateral RI-Turki dan penjelasan/jawaban atas pertanyaan tertulis delegasi Komisi I DPR RI diikuti dengan acara diskusi dan tanya jawab. Setelah RDP dilanjutkan dengan temu dialog delegasi antara Komisi I DPR-RI dengan anggota masyarakat Indonesia yang tinggal di Turki.
- b) Pokok-pokok paparan, yakni :
- Penyampaian visi misi KBRI Ankara.
 - Paparan singkat/*overview* mengenai profil negara Turki, kegiatan prioritas KBRI Ankara di bidang politik (saling kunjung kedua Presiden dan hasil-hasilnya, pelaksanaan forum Konsultasi Bilateral Politik, dukungan pencalonan di berbagai OI, kesepakatan/perjanjian bilateral, peran kedua negara di kawasan masing-masing /ASEAN-

CICA), ekonomi (peningkatan volume perdagangan bilateral, dengan target 5 milyar pada tahun 2014, hasil kajian *Joint Study Group* mengenai *Comprehensive Trade and Economic Partnership Agreement/CTEP*), sosial budaya (pertukaran misi kesenian), kekonsuleran (perlindungan WNI, *Visa on Arrival*), dan kerjasama pertahanan (perjanjian kerjasama industri pertahanan), kerjasama multilateral (D-8 dan OKI).

- Penjelasan/jawaban mengenai beberapa pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Komisi I DPR-RI terkait dukungan, sarana dan prasarana, personalia, peran Atase Teknis serta penganggaran KBRI Ankara.
- Rencana pembukaan KJRI Istanbul yang saat ini dalam proses penyelesaian teknis oleh instansi terkait Pemri. (Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal RI di Istanbul, Turki, telah ditandatangani tgl. 01 April 2011).

7. Pertemuan dengan Komisi I DPR RI dengan masyarakat Indonesia di Turki, tanggal 17 April 2010.

Dalam pertemuan ini diisi dengan paparan Komisi I DPR-RI mengenai perkembangan terkini di tanah air, termasuk kehidupan demokrasi yang semakin dinamis, kehidupan ekonomi dan sektor pendidikan yang secara perlahan terus meningkat dan menjangkau masyarakat di daerah, kasus keamanan/terorisme (bom di Cirebon).

Selanjutnya Delegasi meminta masyarakat/mahasiswa untuk senantiasa turut membantu menjaga citra positif Indonesia sebagai Duta Bangsa di luar negeri.

Lebih lanjut dalam pertemuan ini dilakukan tanya jawab terkait rencana pembangunan gedung DPR-RI yang baru, hal lain dibicarakan mengenai upaya pembebasan WNI yang di sandera di Somalia.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Secara keseluruhan Kunjungan Kerja Delegasi Komisi I DPR-RI ke Turki telah berlangsung dengan baik dan lancar. Momentum kunjungan yang dilakukan dua minggu sesudah kunjungan kenegaraan Presiden Gul Ke Indonesia, menyisakan suasana kegembiraan Presiden Gul atas keberhasilan kunjungannya ke Indonesia. Presiden Gul memberikan apresiasi atas penyambutan dari Pemri / Presiden R.I. dan pengaturan program yang sangat baik selama kunjungannya di Indonesia.
- b. Meskipun kunjungan delegasi Komisi I dilaksanakan dalam Masa Reses Parlemen Turki, delegasi RI diterima oleh Mr. Yasar Yakis, anggota Parlemen Turki / Ketua Komisi Harmonisasi UE (mantan Menlu Turki, yang ikut dalam delegasi Presiden Gul ke Indonesia). Mr. Yakis juga ikut mendampingi dalam pertemuan delegasi dengan Presiden Gul.
- c. Selama kunjungan terdapat kesan keinginan kuat dan kesiapan perusahaan industri strategis Turki untuk melakukan kerjasama yang lebih erat lagi dengan industri pertahanan Indonesia dengan memanfaatkan momentum hasil kunjungan Presiden Gül ke Indonesia dan pasca penandatanganan Perjanjian Kerjasama Industri Pertahanan pada bulan Juni 2010.
- d. Sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan Komisi I DPR-RI ini dan memanfaatkan momentum kesepakatan kedua Presiden untuk meningkatkan kerjasama RI-Turki di semua bidang, kiranya dapat segera dimulai langkah-langkah menuju proses ratifikasi naskah Perjanjian Industri Pertahanan RI-Turki, maupun tindak-lanjut kesepakatan / perjanjian / MoU lainnya

Demikian Laporan Kunjungan Dinas Delegasi Komisi I DPR RI ke Turki dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara. Diharapkan hasil kunjungan tersebut dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada DPR RI dan Pemerintah RI.

Jakarta, Mei 2011

Ketua Delegasi

Sekretaris Delegasi

ttd

ttd

(Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si)

A-73

(H. Tri Tamtomo, SH)

A-322

**DAFTAR DELEGASI KOMISI I DPR RI
DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA KE ANKARA, TURKI
17-22 APRIL 2011**

1. Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si	F-PKS	Ketua Delegasi
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si	F- Demokrat	Anggota Delegasi
3. Mahyudin, ST, MM	F- Golkar	Anggota Delegasi
4. Drs. H.A. Muchamad Ruslan	F- Golkar	Anggota Delegasi
5. H. Tri Tamtomo, SH	F- PDI Perjuangan	Anggota Delegasi
6. Ir. H. Azwar Abubakar, MM	F-PAN	Anggota Delegasi
7. H. Amin Suparmin	F-PPP	Anggota Delegasi
8. H. Achmad Daeng Se're, S.Sos	F-PPP	Anggota Delegasi
9. H. Ahmad Rojali, S.Sos	Set. Komisi I	Sekretariat Del.
10. Jaka Adiwiguna, S.Sos	Set. Komisi I	Sekretariat Del.
11. Fajar Wirawan	Kemlu RI	Penasehat Del

**SUSUNAN JADWAL ACARA KOMISI I DPR RI KE TURKI
17-22 April 2011**

1. MINGGU, 17 APRIL 2011

- 17.30 : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Duta Besar RI di Ankara, Turki beserta jajarannya (*with all Embassy Homestaffs*)
19.45 : Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia di Turki

2. SENIN, 18 APRIL 2011

- 09.30 : Pertemuan dengan H.E. Yasar Yakis, Ketua Komisi Harmonisasi Uni Eropa, Parlemen Turki
10.30 : Pertemuan dengan *Undersecretary of the Ministry of National Defence*, Letjen Umit Dundar
11.15 : Pertemuan dengan M.K.E. (*Makina Kimya Endusrisi Kurumu/The Mechanical and Chemical Industry Cooperation*), Maj. Gen. (RETD) Unal Onsiplioglu, Chairman Director MKEK
12.45 : Pertemuan dengan T.A.I (*Turkish Aerospace Industry*)
15.00 : Pertemuan dengan Kepala BIN Turki/MIT, Dr. Hakan Fidan
19.00 : Pertemuan dalam jamuan makan malam dengan Pimpinan Nurol Holding di dampingi oleh H.E. Yasar Yakis, Ketua Komisi Harmonisasi Uni Eropa, Parlemen Turki

3. SELASA , 19 APRIL 2011

- 09.30 : Pertemuan dengan Roketsan Company
12.00 : Kunjungan ke FNSS (*Savunma Sistemleri*)
16.00 : Kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki, H.E. Mr. Abdullah Gull, Istana Cankaya, Ankara

